

ABSTRAKS

TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Oleh:

**RAHMAD IING NUGRAHA
NIM: 00976008309**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung dari bulan Februari sampai Maret 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan oleh fiskus. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yakni mengetahui tata cara penghapusan NPWP yaitu wajib pajak mengajukan berkas penghapusan NPWP dengan menggunakan formulir dan perubahan data wajib pajak dan syarat-syarat penghapusan NPWP untuk semua wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan yaitu harus adanya surat keterangan penyebab penghapusan NPWP, bagi wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia harus adanya surat keterangan kematian dan surat pembubaran untuk wajib pajak badan, serta hambatan-hambatan dalam penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu karna kurangnya pemahaman wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum melakukan permohonan penghapusan NPWP

Kata Kunci: *Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan amat.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul ***Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan***, Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta purek, I, II, II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pudek I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku ketua jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan.
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak selaku dosen pengajar di jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Marialdi, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan serta pegawai-pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, yang telah memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Untuk kawan-kawanku geng babon di Jurusan Administrasi Perpajakan, Yaitu Wira Kempot, Aboe Tanggiang, Riki Bandit, Amsaludin, Ari Langang, Irfan Kutir, Pak Pi'i, Eri Simas, Rahimsyah yang telah memberikan motivasi dan suka duka yang kita lalui selama 3 tahun

mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di kantin belakang, semoga kita menjadi orang yang sukses.

10. Buat semua teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Perpajakan 2009 serta adik-adik kelas, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan sukses, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dilain waktu, aku kan selalu merindukan kalian, Amin amin ya rabbal ‘alamin.....

Pekanbaru, April 2012
Penulis

Rahmad Iing Nugraha
NIM. 00976008309

DAFTAR ISI

Abstrak

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah..... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 5

D. Metode Penelitian..... 5

E. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN UMUM..... 8

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 8

B. Visi dan Misi 9

C. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 10

D. Uraian Tugas 10

E. Bagian/Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 13

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK..... 17

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak	17
2. Fungsi Pajak	18
3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	19
4. Syarat Pemungutan Pajak	20
5. Pengelompokan Pajak	22
6. Hak Wajib Pajak.....	23
7. Kewajiban Wajib Pajak	26
8. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak.....	27
9. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak	29
10. Sanksi Tidak Memiliki NPWP	29
11. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak.....	30
12. Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak	30
13. Tinjauan Pajak Dalam Islam	31

B. Tinjauan Praktek

1. Syarat-Syarat Penghapusan NPWP	33
2. Tata Cara Penghapusan NPWP	35
3. Pihak Yang Terkait Dalam Penghapusan NPWP	39
4. Data Wajib Pajak yang Melakukan Penghapusan NPWP	39
5. Hambatan Dalam Penghapusan NPWP	40

BAB IV	PENUTUP	41
A.	Kesimpulan	41
B.	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....		43

DAFTAR TABEL

Tabel III.I. Data Wajib Pajak Yang Melakukan Penghapusan NPWP	39
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai rakyat yang cinta akan tanah air, masyarakat harus mempunyai jiwa sosialisasi dan kegotongroyongan yang tinggi, dalam upaya meningkatkan pembangunan di Negara ini. Indonesia merupakan Negara yang cukup kaya akan sumber daya alamnya yang bisa menjadikan masyarakatnya menjadi makmur, suksesnya pembangunan tentu tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang serta menjamin keselamatan masyarakatnya, pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar sebagai syarat agar pembangunan dapat berhasil, dengan pengolahan dana yang baik maka semua sektor pendapatan Negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu dari peran serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional adalah dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara, karna pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran dan belanja Negara. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan Negara, telah memberikan

kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai pencerminan warga Negara yang baik dan taat hukum.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan politik, pajak selalu mengalami perubahan demi untuk tercapainya pembangunan yang efektif, dalam hal ini masyarakat adalah sebagai faktor yang mendukung untuk menciptakan tujuan tersebut, bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diwajibkan membayar pajak kepada Negara dengan status sebagai wajib pajak, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut dan pemotong pajak, dalam hal ini wajib pajak diberi kebebasan atau kepercayaan untuk dapat melaksanakan keikutsertaan dalam meningkatkan pembangunan nasional tersebut melalui sistem self assessment, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai wajib pajak.

Di samping itu tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah karna system perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, di dalam perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan cara wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak, karna Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas dan tanda pengenalan diri yang

diberikan kepada wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007.

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak juga dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dengan cara wajib pajak mengajukan surat permohonan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak, penghapusan NPWP hanya dapat disetujui apabila utang pajak telah dilunasi atau dibayarkan kepada Negara.

Tabel I.1
Data/jumlah Wajib Pajak Sebelum Melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib (NPWP) Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

Tahun Pajak	2009	2010	2011
Jumlah WP	19.254	25.476	30.972

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya karna wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan misalnya wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan, wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak , wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, Bentuk Usaha Tetap yang karna sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.

Hambatan-hambatan dalam penghapusan NPWP yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum melakukan permohonan penghapusan NPWP, dan fiskus tidak mengetahui Wajib Pajak tertentu tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif karena ahli warisnya tidak melaporkannya.

Permohonan penghapusan NPWP wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WP orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan WP diterima secara lengkap.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dihapuskan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam perpajakan, baik dalam memenuhi hak maupun kewajiban perpajakannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian antara wajib pajak dengan pemerintah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **”Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”**, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

B. Perumusan masalah

Dari uraian diatas dan melihat permasalahan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“ Bagaimanakah Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan“.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan.
- b. Untuk menjalin komunikasi yang baik antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan permasalahan lain yang terkait.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman No.247 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2012

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada kepala seksi pelayanan dan pegawai-pegawai kantor tempat penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Observasi. (1) Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini. (2) Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung lapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, uraian tugas, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak, pengelompokan pajak, pengertian NPWP, dasar hukum NPWP, tata cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang - undangan dengan menerapkan system self assessment serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi kantor pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan di bentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tangkerang Timur

B. VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

1. Visi

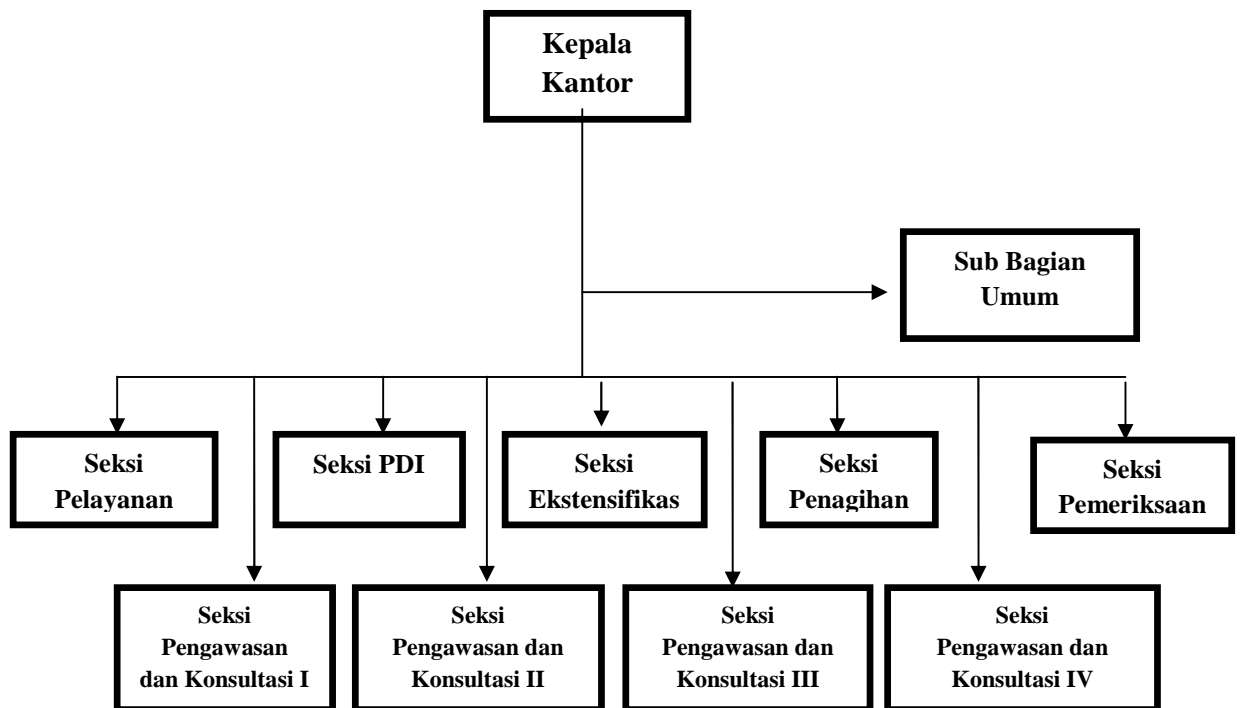
Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat.

2. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.

**C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Pekanbaru Senapelan**

Gambar II.1
Struktur Organisasi
KPP Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

D. Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Senapelan

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya

terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan

3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

- g. Pelayanan dukungan teknis computer
- h. Pemantauan aplikasi *e_SPT dan e-filing*
- i. Penyiapan laporan kinerja

5. Seksi Exstensifikasi

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan exstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Seksi Penagihan

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Seksi Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya

- b. Bimbingan dan hinbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi

E. Bagian/Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Susunan organisasi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

Senapelan terdiri dari :

1. Kepala Kantor : Ponti K. Mawardi
2. Sub Bagian Umum : Gatut Nugroho
Terbagi 4 Sub Seksi
 - a. Bendaharawan : Chotama
 - b. Pelaksanaan Rumah Tangga : Ernawati Siregar
 - c. Pelaksanaan Kepegawaian : Arzen
 - d. Pelaksana Kesekretariat : Nurika Rahmanita
3. Seksi Pelayanan
 - Kepala Seksi : Mariyaldi,SE
 - Pelaksana Pelayanan : Muhammad Jailani
 - : Marlis
 - : Rumondang Imelda N
 - : Novia Rahmawati
 - : Gama Pamungkas
 - Tempat Pelayanan Terpadu : Sri Wahyuni
 - : Erlida

: Hervianda Robiansyah

: Ferdian

: Rio Steven

: Rizal Fahreza

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi : Emri Mora S

Pelaksana PDI : Dhodi Okyanto

: Budi Wahyu Widiyanto

: Lufti Santoso

: Subiakto S

: Joko Sulistio

: Lasron Lumban Raja

: Eko Rohardiyanto

: Andri

: Tengku Susi Indrianty

: Purnama Sari Saragih

: Dwi darmawan

: Larno

: Ahmad Muttaqin

: A.Halim J

: Bangun Efendi N

: Wahyu Hanafi Azis

: Arzen Asbari

- | | |
|--|----------------|
| | : Doni Pratama |
|--|----------------|
5. Seksi Exstensifikasi
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Kepala Seksi | : Muhammad Rosyadi |
| Pelaksana Exstensifikasi | : Awal Jon |
| | :Rosmawati |
| | :Taufik Adhi Harison |
| | :Eef Herviyanto |
6. Seksi Penagihan
- | | |
|---------------------|------------------|
| Kepala Seksi | : Haidar Tanjung |
| Pelaksana Penagihan | : Jutiza Sunisu |
| | : Kordinan Manik |
7. Seksi Pemeriksaan
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kepala Seksi | : Basri Anwar |
| Pelaksana Pemeriksaan | : Wawan Edi Setiawandy |
| | : Supranata Simanullang |
| | : Suryanta,Ak |
| | : Joko Pramono |
| | : Budhi Sukmana |
| | : Ronny Petra Amzar |
| | : Johannes Ritonga |
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Kepala Seksi | : Ardy Sam Wibawa |
| Account Resepresentative | : Muhammad Amin |

: Ernita Sari Surono

: Yoanita Abrianti Siregar

: Leo Narang Ali

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Kepala Seksi : Mohammad Andhi Kurniawan

Pelaksana Waskon II : Yanto Herayanto

Account Representative : Hassan Bassri

: Ika Dessy Andrina

: Yusral Abdillah

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Kepala Seksi : Sonny Zulijanto

Pelaksana Waskon III : Saiful Azman

Account Representative : Siti Suwarni

: Silvia Fransisca s

: Junaldi

: Eko Setiawan

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Kepala Seksi : Agus Maulana

Pelaksana Waskon IV : Arif Dwi Hartanto

Account Representative : Rhein Alde N.S

: Yenny Lora

: Suyadi

: Daniel D. Sembiring

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut: Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani dalam Bohari (2008:23) Pajak adalah iuran pada Negara yang (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths dalam Bohari (2008:24) Pajak adalah prestasi perintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman dalam Bohari (2008:24) Pajak adalah iuran wajib berupa, uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kontribusi wajib/kewajiban kepada negara
2. Bersifat memaksa, dan dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
4. Tidak ada imbalan secara langsung (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjuk
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Dalam Mardiasmo (2008:3) Pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2008:3) Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dalam mencapai kesejahteraan, beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan pada kepentingan, (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu :

- Unsur Subjektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur Objektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Azas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Supramono (2009:4) berdasarkan azas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang harus dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945

3. Pemungutan Pajak yang Tidak Mengganggu Perekonomian

Negara mengkehendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pengelompokan Pajak

Dalam Mardiasmo (2008:5) pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :

- Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan diatas Air.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

6. Hak Wajib Pajak

1. Kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain adalah:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak
- b. Data dari lain pihak ketiga yang bersifat rahasia
- c. Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis tentang pajak diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Penundaan Pembayaran

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Atas permohonan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan sangat hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan likuiditas.

3. Pengangsuran Pembayaran

Apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

4. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Apabila wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik SPT Tahunan Pph Badan maupun Pph Pasal 21.

5. Pengurangan Pph Pasal 25

Apabila wajib pajak mengalami kesulitan dikarenakan usahanya, sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditentukan sebelumnya, maka wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran Pph Pasal 25.

6. Pengurangan Pajak Bumi Bangunan

Wajib pajak orang pribadi dan badan karna kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karna sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang

7. Pembebasan Pajak

Apabila wajib pajak mengalami musibah seperti bencana alam. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan

8. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak (BKP) tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan dikawasan tertentu seperti kawasan berikat mendapat fasilitas PPN tidak dipungut antara lain atas import dan perolehan bahan baku, dalam hal wajib pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar, dipotong atau

dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, untuk wajib pajak masuk kriteria wajib pajak patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk Pph dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima.

9. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding.

7. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *Self Asesment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, kewajiban-kewajiban wajib pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) mengambil sendiri dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

6. Jika diperiksa wajib pajak harus:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencacatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

8. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut Pasal 1 angka 6 UUD KUP adalah nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu Nomor Pokok Wajib Pajak saja untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya, dengan identitas ini Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai 15 (lima belas) digit, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Digit ke 1-9 = kode wajib pajak, yaitu:
 - 1. Digit 1-2 = kode jenis wajib pajak (orang pribadi/badan)
 - 00 = kode WP non subjek
 - 01-04 = kode WP badan
 - 05-08 = kode WP orang pribadi
 - 09 = kode cadangan
 - 2. Digit ke 3-8 = kode nomor urut wajib pajak
 - 3. Digit ke 9 = kode angka pengecekan
- b. Digit ke 10-15 = kode administrasi perpajakan
 - 1. Digit ke 10-12 = kode KPP
 - 2. Digit ke 13-15 = kode cabang wajib pajak.

9. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
4. Untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen-dokumen yang dianjurkan, seperti : dokumen import dan dokumen ekspor.

10. Sanksi Tidak Memiliki NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau

melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi yang dilakukan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan.

11. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak

Dasar hukum Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. UUD KUP pasal 2 ayat 1 - 5
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yaitu :
 - a. Nomor : KEP-515/PJ/2000, tanggal 4 Desember 2000
 - b. Nomor : KEP-161/PJ./2001, tanggal 21 Februari 2001
 - c. Nomor : KEP-225/PJ./2001, tanggal 20 Maret 2001
 - d. Nomor : KEP-38/PJ.2001, tanggal 8 Mei 2001.

12. Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Tempat pendaftaran NPWP dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi dan pengusaha tertentu.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karna hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

13. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

B. TINJAUAN PRAKTEK

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak, akan tetapi juga diperhatikan bahwa NPWP juga diterbitkan secara jabatan. Wajib pajak yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) UU KUP dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.3/2008.

Ketentuan mengenai Penghapusan NPWP diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah dirubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sebagai Aturan pelaksanaan pasal 2 ayat 5 Undang-undang KUP, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Keputusan Nomor Kep-161/PJ/2001 pada tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. Syarat-syarat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena WP sudah tidak memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya :

- Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan, diisyaratkan adanya fotocopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - Wajib Pajak meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli warisnya, diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh warisnya.
 - Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak, diisyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang
2. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, diisyaratkan adanya surat nikah /akte perkawinan dari catatan sipil
 3. Wajib Pajak Badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, diisyaratkan adanya surat pembubaran
 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan status sebagai BUT, diisyaratkan adanya permohonan WP dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak
 5. Dianggab perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya dapat disetujui apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tertentu tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena :

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan

2. Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 2 Ayat 6 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan berkas penghapusan NPWP dengan menggunakan Formulir dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya.
- b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas penghapusan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal penghapusan sudah lengkap, petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas penghapusan kemudian diteruskan kepada

seksi pemeriksaan untuk di proses dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) pemeriksaan

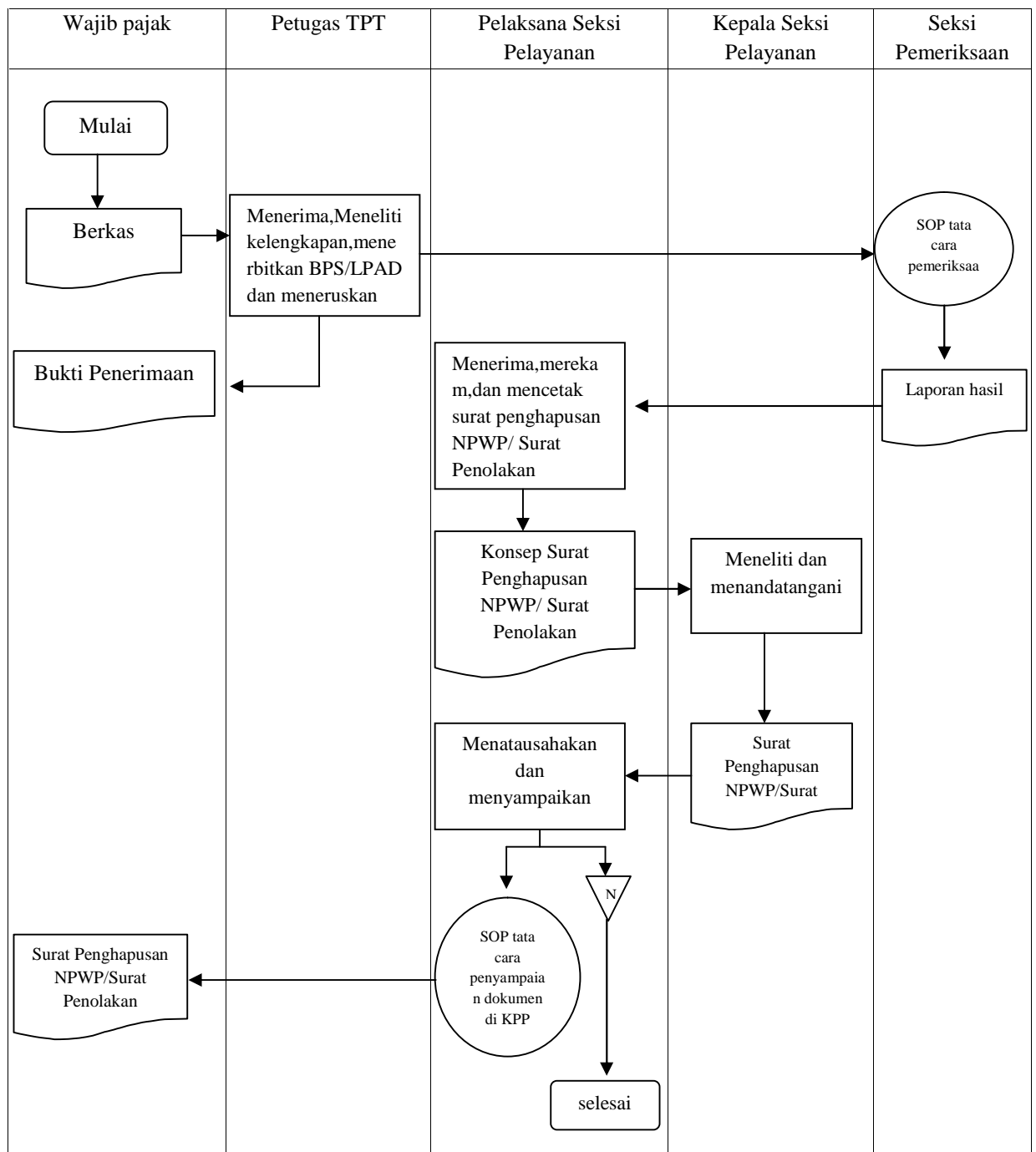
- c. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam laporan hasil pemeriksaan, mencetak Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk menandatangani
- d. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak kemudian mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan
- e. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak
- f. Pelaksanaan Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP penyampaian dokumen di Kantor Pelayanan Pajak).

Permohonan penghapusan NPWP Wajib Pajak harus diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat, maka permohonan penghapusan NPWP Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan surat keputusan penghapusan NPWP

oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. Permohonan penghapusan NPWP Wajib Pajak harus diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat, maka permohonan penghapusan NPWP Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan surat keputusan penghapusan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Gambar III.1

**TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN.**



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

3. Pihak Yang Terkait Dalam Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam proses penghapusan NPWP pihak-pihak yang terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah:

- a. Kepala Seksi Pelayanan
- b. Pelaksana Seksi Pelayanan
- c. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Wajib Pajak

4. Data Wajib Pajak Yang Melakukan Penghapusan NPWP

Berdasarkan tanggapan responden dilapangan tentang jumlah wajib pajak yang melakukan penghapusan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini:

Tabel III.1.

Data Wajib Pajak Yang Melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib (NPWP) Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

Tahun Pajak	2009	2010	2011
WP Orang Pribadi	36	61	48
WP Badan	18	24	108
Total	54	85	156

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari tabel III.1 diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan penghapusan NPWP mengalami peningkatan, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 69,4 % dan wajib pajak badan sebanyak 33,3 %,

kemudian pada tahun 2011 terjadi penurunan bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 21,3 % dan wajib pajak badan terjadi kenaikan 350 %, lebih besar dari tahun sebelumnya.

Dari keterangan diatas perlu diketahui bahwa terjadinya peningkatan penghapusan NPWP bagi wajib pajak badan itu terjadi karna banyaknya badan usaha yang mengalami kebangkrutan sehingga badan tersebut dibubarkan, sedangkan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena pada tahun tertentu wajib pajak tersebut meninggal dunia, wanita kawin, dan wajib pajak yang penghasilannya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

5. Hambatan-Hambatan Dalam Penghapusan NPWP Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

- a. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum melakukan permohonan penghapusan NPWP
- c. Fiskus tidak mengetahui Wajib Pajak tertentu tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif karna ahli warisnya tidak melaporkannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Persyaratan dalam penghapusan NPWP untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan harus adanya surat keterangan penyebab penghapusan NPWP dan tata cara penghapusan NPWP dimulai dari Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan melalui Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan berkas ke Seksi Pemeriksaan untuk diperiksa setelah diketahui hasilnya.
2. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya dapat disetujui apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa.
3. Banyaknya peningkatan penghapusan NPWP bagi wajib pajak badan itu terjadi karena banyaknya badan usaha yang mengalami kebangkrutan sehingga badan tersebut dibubarkan, sedangkan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena pada tahun tertentu wajib pajak tersebut meninggal dunia, wanita kawin, dan wajib pajak yang penghasilannya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Hambatan dalam penghapusan NPWP yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak dan wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum melakukan permohonan penghapusan NPWP.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai prosedur penghapusan NPWP, agar Wajib Pajak lebih memahami dan lebih mudah dalam melakukan penghapusan NPWP
2. Bagi Wajib Pajak yang melakukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus melengkapi persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Apabila Wajib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, KPP sebaiknya membuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak sehingga proses dapat cepat terselesaikan
4. Perlu bagi fiskus untuk mengupdate data Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seperti meninggal dunia bagi Orang Pribadi dan badan yang telah dibubarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, Jakarta, 2009
- Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (DJP) Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru, 2009
- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta. Edisi Revisi, 2008
- Pandiangan, Liberti, *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002
- Supramono, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Revisi, 2009
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Dirjen Pajak, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Perpajakan, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009*
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, penerbit Salemba Empat, 2011
- www.Pajak.go.id 28 Januari 2012 Pukul 20.00 Wib